



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHD. TAKWIM MASUKU
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 96828

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.675.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 301 m2/324 m2 di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 765.000.000
2. Tanah Seluas 297 m2 di KAB / KOTA HALMAHERA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 419 m2 di KAB / KOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 453 m2 di KAB / KOTA HALMAHERA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 925 m2 di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 675.000.000
7. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
8. Tanah Seluas 1931 m2 di KAB / KOTA HALMAHERA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
9. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 301 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 500.000.000



1. MOBIL, ISUZU PICK UP Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000
2. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
4. MOBIL, SUZUKI XL7 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
235.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	207.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	523.593.317
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.905.843.317
III. HUTANG	Rp.	10.583.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.895.260.317

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.